

ABSTRAK

Masa Orde Baru merupakan rezim yang paling lama bertahan selama 32 tahun di Indonesia. Sosok Soeharto berhasil memperkuat rezim orde baru dengan berbagai upaya. Soeharto berkarir dalam militer sebelum menjabat sebagai presiden, hingga gaya kepemimpinan Soeharto lekat dengan militeristik. Kajian ini disusun untuk mengungkap fakta unik tentang politik keamanan pada masa Orde Baru.

Fokus penelitian ialah kasus penembakan misterius atau petrus yang terjadi pada tahun 1982 hingga 1985. Sifat rezim yang kaut dengan militeristik membuat sebuah kebijakan yang dinilai otoriter demi kepetingan stabilitas keamanan Negara pada kasus tersebut. Berdasarkan Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM berat KOMNAS HAM RI, orang-orang yang dianggap salah di hukum mati tanpa proses hukum yang jelas dan mayatnya dibiarkan begitu saja ke publik sebagai *Shock Therapy*.

Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dengan cara mengumpulkan berita-berita atas peristiwa tersebut yang diambil dari sumber buku, artikel, penelitian terdahulu, karya ilmiah, jurnal, skripsi dan berita online pada internet. Berdasarkan konsep teori *Joseph Nye* mengenai *hard power* kajian ini mengamati kasus penembakan misterius sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah keamanan negara dengan konsep *hard power*. Konsep itu menimbulkan tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan penguasa untuk membuat tunduk pihak lain atas kehendaknya. Kemudian, dominasi ABRI pada saat itu menyebabkan keamanan melemah, kepolisian dan intelejen tidak berfungsi dengan baik. Peran ABRI (TNI dan Polisi) dibuat sibuk untuk mengurus pemerintahan secara politik, sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik militer Soeharto melanggar konsep *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* Pasal 2,3 dan 5 dalam majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)* tahun 1948 yaitu setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM ini tanpa dibedakan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, hak hidup. dan setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi. Karena tindakan penembakan yang dilakukan sengaja, korban dibiarkan tergeletak, masyarakat ketakutan, dan kehilangan hak untuk hidup. Penulis berharap agar pemerintah saat ini mampu menyelesaikan kasus PETRUS ini, sebab Indonesia menganut sistem demokrasi yang menghendaki HAM untuk melindungi rakyatnya.

Kata Kunci :Politik Keamanan, Orde Baru, Penembakan Misterius (PETRUS)

ABSTRACT

The New Order period was the regime that lasted the longest for 32 years in Indonesia. The figure of Soeharto succeeded in strengthening the new order with various efforts. Suharto had a career in the military before ruling as president, until the Suharto leadership style was closely militaristic. This study was compiled to reveal unique facts about political security during the New Order era.

The focus of the research on mysterious or petrus shooting cases occurred in 1982 to 1985. The nature of regulations related to militarism made policies requiring authoritarianism to ensure state security in the case. People who are considered wrong in the law die without a clear legal process and the body is left to sit alone to the public as Shock Therapy.

The research method used is Literature Study by collecting top stories taken from sources of books, articles, research starts, scientific works, journals, theses and online news on the internet. The results of this study were the (Penembakan misterius) mysterious shooter of the new order in 1982-1985 which were Suharto's policies and the ranks of military officials at this time in realizing the country's political security in the 1982-1985 period. Based on the concept of Joseph Nye's theory of hard power, this study examines the mysterious shooting case as an attempt by the government to resolve the country's security problem with the concept of hard power. The concept raises acts of violence that are deliberately carried out by the authorities to make others subject to their will. Then, ABRI's dominance at that time caused security to weaken, the police and intelligence services did not function properly. The role of the Armed Forces (TNI and Police) is kept busy in managing the government politically, socially and economically.

The results of this study indicate that Suharto's military politics violated the concepts of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Articles 2.3 and 5 in the general assembly of the United Nations Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in 1948 namely everyone have the rights and freedoms set out in this Declaration of Human Rights without discrimination based on race, color, gender, language, religion, political opinions, right to life. and everyone must not be tortured or get inhumane treatment and punishment. Because the shooting was done deliberately, the victim was left lying around, the community was afraid, and lost the right to live. The author hopes that the current government is able to resolve the PETRUS case, because Indonesia adheres to a democratic system that requires human rights to protect its people.

Keywords: Politics of Security, New Order, Petrus (Mysterious Shooter)